

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian teori

1. Upaya

Upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang. (Haryanto:2013)

Dalam kamus etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud yaitu usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pemerintah desa

Kata ‘pemerintah’ berasal dari bahasa jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, intruksi). Kemudian dalam bahasa inggris berasal dari kata “*Government*” bentuk baku dari “*Govern*”. Yang berarti institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan kehendak rakyat.

Pemerintah dalam arti sempit lebih cenderung pada eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas adalah lembaga/organ Negara yang melaksanakan tanggung jawab Negara sebagai organisasi sosial masyarakat. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur Negara (termasuk lembaga Negara seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. (Arief : 2013)

Bertolak dari uraian diatas, dijelaskan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang kompleks, besar dan ruwet. Lembaga tersebut mendayagunakan jutaan orang untuk membelanjakan triliyunan rupiah untuk kebutuhan pemerintah dan rakyat. Organisasi yang terkandung didalamnya termasuk politikus, pegawai negeri, dan warga Negara yang saling bersaing, berkonspirasi, dan bekerjasama.

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan tentang arti kata pemerintah, memerintah, dan pemerintahan. Pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang berguna untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem yang menjalankan perintah, yang memerintah.

Di Indonesia istilah “lembaga” digunakan baik dalam arti institusi maupun dalam arti organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization* (Latin: *organizare*, kemudian Inggris; *organize*, berarti membentuk sebuah kebulatan dari sebuah pemahaman). Kesimpulannya organisasi merupakan suatu produk dari kegiatan organizing.

Sebuah organisasi merupakan bentuk atau representasi dari adanya etnis sosial yang terkoordinasi secara sadar. Secara relatif organisasi selalu berupaya untuk mencapai sebuah tujuan pada umumnya atau serangkaian tujuan-tujuan. Demikian pula bila Negara adalah sebuah organisasi yang sangat besar dan kompleks dengan mempunyai tujuan dan cita-cita yang terfasilitasi oleh organisasi pemerintah Negara.

Berbeda dengan pandangan teori sistem, menurut teori sistem organisasi adalah *input, throughput, and output system*,”. Menurut *theories of organization: form, process and transformation* sebuah teori dikonstruksi (dibangun) diatas serangkaian anggapan dasar, seperti teori organisasi berikut ini:

- a. Organisasi ialah organisme hidup. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari definisi organisasi. (kerjasama antar dua lembaga untuk mencapai tujuan tertentu).
- b. Organisasi dan manusia memiliki kesamaan. Sama halnya dengan manusia, pemerintah juga mengalami lahir, tumbuh, sakit dan mati.

Pemerintah sebagai sebuah organisasi dapat ditinjau dari sudut biological, yang berarti sebuah organisme yang hidup dan setiap organisme yang hidup memiliki satu komponen utama yaitu kepala (*head*). Sebuah tubuh hewan atau manusia dikendalikan oleh otak yang berada di bagian kepala. Sama halnya

dengan keluarga, keluarga juga akan dipimpin oleh satu anggota yang memiliki pengaruh kuat dalam keluarga tersebut.

Beralih pada lingkup social, misalnya Kepala Suku, tidak terbentuk melalui cara-cara yang cukup etis dan bermoral. Pembentukan seseorang menjadi sebagai Kepala Suku karena keberhasilannya menaklukkan jago-jago lainnya melalui perkelahian atau perjuadian.

Jika dilihat dari kacamata teori organisasi, Negara dianggap sebagai suatu yang *given* menurut pendekatan kehidupan organisasi, yaitu Negara dianggap seperti organisme yang hidup. Secara anatomi tubuh pemerintah merupakan pemimpin atau kepalanya sedangkan rakyat sebagai anggota tubuh. Sekelompok orang yang bertanggung jawab atas apa yang dijalankannya (kekuasaan) disebut pemerintah.

Dalam keadaan masyarakat yang seperti ini pemerintah harus dapat menciptakan pemerintahan yang ideal. Segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah harus dapat diterima dengan baik oleh rakyat tanpa adanya kecacatan sedikitpun.

Untuk mencapai tujuan diatas, perlu diketahui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan dan terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menurut Ndraha (2003), ada beberapa pendekatan-pendekatan kelembagaan dan pendekatan produk (*output*) yang dapat menerjemahkan arti dari pemerintah:

- a. Pemerintah adalah Badan Publik, yaitu semua badan/institusi yang bertanggung jawab atas sebagian atau semua proses penyediaan (providing) suatu layanan atau jasa melalui otoritas atau privatisasi.
- b. Pemerintah dalam arti luas, seluruh lembaga yang ada di suatu Negara yang telah diatur dalam UUD atau hukum dasar atau konstitusi pada suatu Negara.
- c. Pemerintah dalam arti sempit mempunyai arti yaitu kelembagaan Negara yang berada pada suatu Negara yang terbatas pada kekuasaan eksekutif.

- d. Pemerintah dalam arti pelayanan, mengambil dari konsep *civil servant*, pemerintah diibaratkan seperti warung atau swalayan, pemerintah sebagai pelayan yang akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumennya.
- e. Pemerintah dalam arti Pemerintah Pusat, yaitu pengguna hak atau kekuasaan Negara padatingkat nasional atau tertinggi.
- f. Pemerintah dalam ilmu pemerintahan adalah keseluruhan lembaga yang dianggap cakap atau secara empiric dapat melakukan jasa public atau pelayanan masyarakat.

Pemerintah sebagai institusi penyedia pelayanan kepada masyarakat tentunya harus mengerti mengenai fungsi dari kelembagaan Negara (pemerintah). Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, fungsi merupakan pelaksanaan kebijakan dari tujuan yang akan dicapai. Fungsi bersifat nyata dan jelas. Sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah mustahil.

Rewansyah (2011) berpendapat bahwa ada 5 fungsi utama dari pemerintah, yaitu: (1) Fungsi pengaturan atau regulasi; (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*); (3) Fungsi pemberdayaan aset dan kekayaan Negara; Fungsi keamanan atau perlindungan, berikut penjelasan dari kelima fungsi di atas;

- a. Fungsi Pengaturan atau Regulasi
Fungsi pengaturan oleh pemerintah tak lain adalah aturan hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur segala hal agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, peran pemerintah ke depan adalah membentuk pemerintahan yang efisien, efektif dan produktif.
- b. Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat
Menurut Ryaas Rasyid (2002) konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti, meliputi rupa-rupa kegiatan, dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Sejauh ini padanan bahasa Indonesia kata pelayanan dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu *administering* dalam *administration* dan *servicing* dalam *service (public service and civil service)*.

- c. Fungsi Keamanan, Ketertiban, Pengamanan, dan Perlindungan (Polisional), fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, pengamanan, dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dalam wilayah tanah air agar tidak terjadi kecolongan dalam bidang tertentu misalkan dalam bidang kelautan sering terjadi pencurian ikan oleh kapal asing.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah pusat yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana kegiatan-kegiatan masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah. Kemudian dalam PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 5 dan 6 BAB II tentang kedudukan dan jenis desa, kedudukan desa berada di wilayah kabupaten/ kota, desa terdiri dari atas desa dan desa adat yang didalamnya terdapat masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa dijalankan oleh pemerintah desa. Menurut Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, terdiri dari Kepala Desa yang dibantu perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa. Adapun pemerintah desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Menurut Ndraha (2003) Kepala Desa merupakan pemimpin desa, segala hal yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin formal.

Adapun Pengertian Kepala Desa menurut Tahmit (2008) adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin dari suatu kekuasaan wilayah pedesaan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya garis koordinasi saja oleh camat.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut ini adalah wewenang Kepala Desa;

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa (Perdes)
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 12) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu melaksanakan visi dan misi kepala desa. Kemudian perincian formasinya terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan. Kepala seksi terdiri dari kepala seksi kesejahteraan masyarakat dan kepala seksi pelayanan, sedangkan kepala urusan terdiri dari kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, dan kepala urusan perencanaan. Perangkat desa memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam menjalankan program dan visi misi kepala desa.

1. Sekertaris Desa

Sekertaris desa merupakan unsur atau staf yang membantu kinerja Kepala Desa. Sekertaris desa bertugas di bidang administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh bidang perangkat desa dan pelayanan umum, berikut tugas dan fungsi sekretaris desa:

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila sedang berhalangan
- c) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

2. Kepala Urusan (Kaur)

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa.

1) Kepala Urusan umum

Tugas pokok Kaur umum yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, Kaur umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- b) Pelaksana penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- c) Pengelolaan administrasi perangkat desa
- d) Persiapan bahan-bahan laporan

2) Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok Kaur keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa. Fungsinya antara lain sebagai berikut:

- a) Mengelola administrasi keuangan desa
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa

3) Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok Kaur Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Fungsi Kaur Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kegiatan adminitrai kependudukan
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

4) Kepala Urusan Pembangunan

Kaur Pembangunan memiliki tugas pokok, yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa. Fungsi dari Kaur Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Mengelola tugas pembantuan, dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

5) Kepala Urusan atau Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas pokok Kasi Kesejahteraan Masyarakat adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial kemasyarakatan serta program keagamaan. Adapun fungsi dari Kasi kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

3. Pemberdayaan

(Dobbin, 2007:32) dalam kajian ilmu sosiologi ekonomi, pemberdayaan masyarakat menggarap tiga hal penting yang sangat berpengaruh yaitu *Power* (kekuasaan), *institution* (institusi-institusi), dan *social network* (jejaring sosial). Hubungan-hubungan kekuasaan membentuk perilaku masyarakat ekonomi-baik secara langsung, seperti mengatur komunitas masyarakat yang lebih kecil.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Masyarakat sebagai obyek berarti segala hal kebijakan dan program haruslah diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian sebagai subyeknya masyarakat juga berperan penting dalam pemberian ide-ide dan juga kritisi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Produktifitas masyarakat merupakan salah satu output dari program pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx tentang ekonomi produksi sebagai basis masyarakat dapat dijelaskan melalui tiga penjelasan berikut (Cuff et al, 2006:20).

1. Aktivitas produktif adalah kodrat manusia
2. Secara logika aktivitas produktif merupakan langkah awal dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, secara sederhana, manusia tidak akan berbuat yang lainnya sebelum kebutuhan fisiknya terpenuhi.
3. Bentuk aktivitas sosial yang lebih kompleks merupakan timbal balik dari struktur aktivitas produktif.

Keinginan manusia akan kelengkapan kebutuhan hal fisik dan sosial mendorong untuk mengembangkan cara dan ide agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih pada saat ini masyarakat modern selalu berambisi untuk dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi yang ada. Tidak hanya pada masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan juga sudah mulai sadar dan memiliki kesempatan yang sama akan hal itu.

Perilaku masyarakat sangat menarik untuk diteliti dan diperbincangkan di tengah-tengah modernisasi dan globalisasi. Menurut Weber, tindakan sosial adalah makna subyektif tindakan individu (aktor). Tindakan ekonomi merupakan perilaku seseorang yang diorientasikan kepada pemanfaatan dan juga perilaku dari orang lain. Weber percaya bahwa penjelasan tentang tindakan sosial sangat dibutuhkan untuk memahami makna-makna dan motif-motif yang mendasari perilaku manusia.

Weber mengembangkan teorinya tentang tindakan sosial dengan membaginya menjadi empat tipe tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan tradisonal, tindakan ini lebih mendasarkan pada kepercayaannya terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat yang sudah ada. Bentuk dari tindakan tersebut dapat berupa kesepakatan peraturan maupun dalam bentuk perbendaan.
2. Tindakan afektif, yaitu perilaku yang melibatkan unsur emosi (nafsu) atau motif sentimental. Afektif dapat diartikan sebagai tindakan emosional kasih sayang, contohnya kasih sayang orang tua terhadap orang tua.
3. Tindakan berorientasi nilai (*wertrational*), sering disebut sebagai rasionalitas nilai, yaitu perilaku yang didasari atas keinginan dan tujuan hidup, agama menjadi patokan utama dalam cara berpikir ini.
4. Tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu perilaku pencapaian tujuan berbasis pilihan rasional. Tindakan sosial ekonomi manusia diartikan sebagai suatu cara yang rasional atau masuk akal yang paling efektif dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan dan perilaku masyarakat, terutama masyarakat pedesaan sudah mulai masuk pada ranah tindakan rasional instrumental. Hal ini ditunjukkan dari proses penerimaan masyarakat dari adanya arus modernisasi dan globalisasi. Terkadang juga kemajuan suatu Negara juga berasal dari proses peradaban yang sempurna yang diciptakan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Seirama dengan pernyataan diatas, teori perilaku kolektif atau tindakan kolektif, perilaku irasional menjadi karakteristik tindakan kolektif tidak dapat secara mudah dianalisis dengan menggunakan model tindakan aktor rasional. Kehidupan masyarakat yang dilandasi atas nilai-nilai dan norma yang telah disepakati bersama dapat membendung tindakan irasional yang dapat perilaku menyimpang (*deviance*).

Dalam teori struktural fungsional, terdapat dua pandangan utama tentang struktur sosial. Pertama, perspektif institusional atau kultural. Dalam perspektif ini, elemen-elemen dasarnya meliputi norma-norma, kepercayaan-kepercayaan,

dan nilai-nilai yang mengatur tindakan sosial. Dalam perspektif ini, struktur sosial merupakan sebuah struktur institusional, yang terdiri dari seperangkat model kultural dan normative yang mendefinisikan keinginan-keinginan individu (aktor) dari perilakunya. Kedua, perspektif relasional, dalam perspektif ini elemen-elemen yang membentuk struktur utamanya ialah hubungan-hubungan sosial. Berdasarkan perspektif ini, analisis struktur sosial terfokus pada jaringan hubungan sosial yang menghubungkan individu, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat (Haryanto, 2012 : 29).

Weber mengatakan, masyarakat modern ditandai oleh semakin banyaknya tindakan rasional instrumental. Ciri-ciri yang sangat terlihat dan mendominasi dari masyarakat modern ialah rasionalisasi kehidupan sosial. Pemeragaman profesi di kawasan pedesaan baik itu petani, pegawai negeri sipil (PNS), pedagang maupun nelayan semua dilakukan atas tindakan yang logis dan berdasarkan logika. Tindakan rasional instrumental ini juga menimbulkan spekulasi yang beragam dari beberapa ahli. Hilangnya identitas dari sebuah kebudayaan ini sering mengakibatkan persepsi yang sulit untuk diubah.

Pemeragaman profesi di kawasan pedesaan memang sudah harus dilakukan, mengingat semakin tingginya arus urbanisasi dari desa ke kota. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang terpenuhi dengan baik dari hal yang paling sederhana saja dapat menimbulkan masalah yang besar. Permasalahan kependudukan dan demografi ini semakin menjadi masalah yang serius jika terus dibiarkan begitu saja. Tidak hanya masalah perpindahan penduduk saja akan tetapi masalah demografi muncul semakin kompleks seperti halnya permasalahan kecemburuan sosial, kemiskinan, dan masalah kesehatan masyarakat. Hal itu perlu adanya keselarasan hidup antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan.

Melanjutkan kajian diatas, harmoni sosial dan mekanisme redistributif itu pada saat ini sudah mengalami kemunduran dan mengalami erosi. Kehidupan masyarakat yang kental akan romantika hubungan masyarakat yang

menunjukkan moralitas dan nilai luhur, tetapi lebih condong pada perilaku masyarakat yang berorientasi pada perhitungan dan keuntungan berupa materi ekonomi. Hasil observasi yang dilakukan Breman dan Wiradi (2002:28-29) ikatan sosial ekonomi masyarakat yang menyatukan segmen penduduk yang lebih rendah di masyarakat pedesaan mengalami pendangkalan, baik dalam substansi maupun durasinya. Perilaku konkrit yang menunjukkan hal itu ialah, bahwa kaum konglomerat khususnya dari kalangan pengusaha sudah mulai meninggalkan hal-hal yang berbau “Tradisional”. Kepekaan sosial seakan-akan menjadi taruhan bagi masyarakat yang sudah berada pada tingkatan ekonomi yang tinggi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya tidak terlepas dari ketergantungan terhadap hasil dari orang lain tidak bisa dielakkan lagi. Jaringan interaksi sosial yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat menjadi salah satu kunci dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Dalam perspektif Durkheim, semakin cerdas dan maju tingkat pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat ketergantungannya. Pada lingkup masyarakat yang sempit, tingkat kebutuhan manusia yang rendah cenderung akan dipenuhi dengan cara mandiri.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang semakin berkembang juga berpengaruh dalam pengorganisasian ekonomi. Pola pembagian kerja di masyarakat setidaknya didasarkan atas keahlian bidang kerja, tingkat pendidikan dan persebaran usia. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak bisa dipisahkan dari tiga hal ini yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Pada Negara yang berkembang seperti Indonesia, kegiatan produksi mungkin begitu kental terlihat. Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi Negara yang berpredikat sebagai Negara produsen.

Wujud yang paling terlihat dari adanya kebudayaan massa tersebut adalah tumbuhnya budaya konsumerisme di kalangan masyarakat. Budaya ini telah

mengubah perilaku masyarakat dalam membedakan antara keinginan (*want*) dengan kebutuhan (*need*). Masyarakat tidak lagi membuat skala prioritas yang dibutuhkannya. Kecenderungan ini tidak sengaja dilakukan pada masyarakat kalangan menengah keatas (Haryanto, 2012:246).

Paradigma pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang muncul kemudian sangat beragam. Akan tetapi, pada intinya makna dari sebuah pembangunan adalah lebih menekankan distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan hidup, dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kemudian muncul gagasan-gagasan, seperti *growth with equity* (pertumbuhan disertai dengan pemerataan), *sustainable development empowerment* (pemberdayaan), dan sebagainya (Haryanto, 2012:187).

Munculnya pandangan-pandangan baru dalam konsep pembangunan ini disebabkan dari semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ilmu ekonomi. Seiring sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang dilakukan pada sebuah Negara, maka terjadi pula perubahan menadasar pada aspek kehidupan, seperti hubungan antara sebagai pembuat kebijakan publik dan masyarakat sebagai basis utama pendorong perubahan sosial (*agent of sosial change*). Dalam kurun waktu selama ini hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih bersifat berhadap-hadapan (*vis a vis*) (Haryanto, 2012:198).

Althuser, sebagai dikutip Gotham (2005:789), misalnya mempertahankan pendapat bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil, seperti partai politik, gerja, masjid, dan sekoah merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebaliknya pemerintah memiliki tugas untuk mengatur berbagai bidang kehidupan yang berkepentingan pada masyarakat luas. Lebih dari itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan masyarakat. Sistem pembagian tugas yang sangat jelas harusnya mampu mempermudah kinerja pemerintah.

Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat juga memiliki peranan penting dalam perumusan dan pengambilan kebijakan yang diperuntukan bagi

masyarakat. Munculnya kelompok-kelompok tertentu seakan-akan menjadi suatu penghambat program pemberdayaan, jika kualitas sumber daya manusianya tidak mendukung. Banyak hal yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia, diantaranya yaitu faktor pendidikan, status sosial keluarga, dan lingkungan interaksi sosial.

Kelompok sosial dengan komunitas sosial merupakan satu hal yang memiliki arti yang sama. Sebuah arti luas pengembangan komunitas disepakati dalam konferensi internasional tentang organisasi-organisasi pembangunan komunitas pada tahun 2004. Definisi itu tertera dalam Deklarasi Budapest, output dari para peserta konferensi yang berasal dari lebih 30 negara. Berikut definisi pengembangan komunitas (Craig, 2007:339)

“Pengembangan komunitas adalah suatu cara untuk memperkuat masyarakat dengan memprioritaskan tindakan komunitas, dan perspektif mereka tentang kebijakan pembangunan nasional, ekonomi dan lingkungan. Fokus pemberdayaan adalah komunitas lokal, baik secara geografis, komunitas yang memiliki kepentingan atau identitas dan komunitas yang mengorganisasikan dirinya pada tema khusus atau inisiatif kebijakan. Memperkuat kapasitas sebagai warga negaraaktif melalui kelompok-kelompok komunitas, organisasi-organisasi dan jaringan-jaringan, kapasitas institusi dan agensi dalam melakukan dialog dengan warga masyarakat untuk membentuk dan menentukan perubahan dalam komunitasnya. Keseluruhannya melakukan peran krusial dalam mendukung kehidupan demokrasi aktif melalui peningkatan otonomi suara dari komunitas yang rentan dan tidak beruntung.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Menurut Suharto (2005 : 60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut: sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk : 2005). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan,

pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

a. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

b. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006):

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pemberdaan masyarakat meletakkan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Berikut ini pemberdayaan dalam segala bidang kehidupan yang ada di masyarakat.

- 1.) Pemberdayaan Politik, yang memiliki maksud untuk *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah.
- 2.) Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di Kabupaten Pacitan program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan sejak dulu. Salah satu bukti adanya program pemberdayaan masyarakat lansia di Kabupaten Pacitan yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 284/KPTS/ 408.21/ 2015 dan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 720/ KPTS/ 408.21/21 mengenai pembentukan tim Pembina program terpadu peningkatan peranan lansia menuju keluarga sejahtera.

Pada bidang sosial ekonomi dijelaskan masyarakat lansia di tiap-tiap desa dan kelurahan diberdayakan melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha ekonomi produktif ialah program yang dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan produktifitas melalui kegiatan bidang ekonomi. Adapun tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif yaitu,

meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kegiatan usaha berbasis potensi lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lansia. Arah kebijakan ekonomi melalui kegiatan ekonomi kerakyatan yang tersistem seperti halnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No. 19/PB/2005 mendefinisikan usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Dapat disimpulkan Usaha Ekonomi Produktif ialah suatu upaya secara ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi yang ada guna mewujudkan penambahan pendapatan, memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kemakmuran.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu bagian program yang produktif dan ide kreatif dari lembaga kemasayarakat seperti di desa. Usaha ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Pengoptimalan Usaha Ekonomi Produktif secara terstruktur dan tersistem akan memberikan sumbangsih perekonomian kepada masyarakat. Adapun tujuan umum dari dari pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif ialah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lansia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
4. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat pedesaan, sebagai salah satu modal sosial untuk memperkuat keberadaan desa

5. Program pengembangan komoditi unggulan daerah

Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat misalnya hasil bumi, kelompok usaha, peternakan, dan pertanian

Agar program Usaha Ekonomi Produktif dapat berjalan dengan efektif dan sesuai rencana dengan memberikan paparan tiga strategi pengelolaan program dengan menjalankan pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan.

Strategi pengelolaan program tersebut meliputi penyediaan fasilitas, peningkatan potensi, pendukung pengembangan usaha, dan bimbingan teknis wirausaha. Sedangkan pembinaan mencakup pemberian motivasi dan perluasan jaringan.

- 3.) Pemberdayaan Sosial Budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment*, guna meningkatkan nilai manusia.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63)

- a. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara

mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

4. Masyarakat Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan proses dari tumbuh kembang yang akan dialami setiap individu, yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan lingkungan (Azizah, 2011). Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang mulai dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menua

(menjadi tua). Semua orang akan mengalami proses untuk menjadi tua dan masa hidup manusia yang terakhir merupakan masa tua. Stanley & Beare (2007), mendefinisikan lansia berdasarkan karakteristik sosial, masyarakat menganggap bahwa orang yang telah tua jika menunjukkan ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan pada kulit, dan hilangnya gigi (ompong).

World Health Organization (WHO, 2014) menetapkan bahwa 65 tahun termasuk katagori lansia. Negara-negara Asia, lansia adalah mereka yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Orang yang sehat dan aktif berusia 65 tahun menganggap usia 75 tahun sebagai pemulaan lanjut usia. Di masa ini secara bertahap seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial (Brunner dan Suddart, 2000). Jadi lansia adalah suatu proses yang akan dialami setiap manusia dan secara bertahap akan mengalami kemunduran fisik, mental, sosial.

Batasan lansia berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1998 adalah 60 tahun. Pendapat beberapa ahli dalam program kesehatan usia lanjut, (Depkes dalam Sutikno, 2011) membuat pengelompokan Batasan lansia sebagai berikut:

1. Kelompok pertengahan usia (45-54 tahun)
2. Kelompok lanjut usia dini (55-64 tahun)
3. Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas)
4. Kelompok usia lanjut dengan risiko tinggi (berusia 70 tahun ke atas atau kelompok usia lanjut yang hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat atau cacat). Menurut WHO lanjut usia meliputi (Notoatmodjo, 2007 dalam Sutikno 2011):

1. Usia pertengahan (middle age), usia 45 – 59 tahun
2. Usia lanjut (elderly), usia 60 – 70 tahun
3. Usia lanjut tua (old), usia antara 75 – 90 tahun
4. Usia sangat tua (very old), usia di atas 90 tahun

Semakin bertambahnya umur, proses penuaan secara degeneratif akan berdampak pada perubahan-perubahan di diri manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (Kuntjoro, 2002 dalam Sutikno, 2011):

1. Perubahan fisik

Dengan bertambahnya usia, secara umum kekuatan dan kualitas fisik dan juga fungsinya akan menurun. Perubahan dari tingkat sel sampai kesemua organ tubuh.

2. Perubahan mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental yang pertama adalah perubahan fisik, kesehatan umum, keturunan, tingkat pendidikan, dan lingkungan.

3. Perubahan psikososial

Pada umumnya setelah orang memasuki lansia akan mengalami penurunan kognitif dan psikomotor. Dengan adanya penurunan fungsi tersebut, lansia mengalami perubahan psikososial terkait dengan kepribadian lansia itu sendiri.

4. Perkembangan spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mencari tujuan dan arti hidup, kebutuhan untuk saling mencintai dan dicintai serta, kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan maaf.

B. Kajian penelitian yang relevan

Setelah melakukan pencarian beberapa literatur, penulis menemukan penelitian terhadap masalah pemberdayaan masyarakat lanjut usia dan program embung desa.

1. Hariani, Fitri. skripsi dengan judul “ *Pemberdayaan Lanjut Usia Oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia (UPT PSLU) Jember* ”. penelitian ini untuk mengkaji, dan mendeskripsikan mengenai proses dan hasil pemberdayaan terhadap lanjut usia yang diberikan oleh UPT

PSLU Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh UPT PSLU Jember dengan melalui, Pertama pendekatan awal yaitu orientasi dan konsultasi yang diberikan kepada lansia, Kedua penerimaan dalam tahap ini merupakan identifikasi petugas UPT PSLU terhadap lansia, Ketiga proses perencanaan dan penambahan pengetahuan dalam tahap ini petugas UPT PSLU melakukan pemahaman masalah, pengelompokan masalah yang dialami lansia dan memberikan program-program pemberdayaan yang akan dilakukan oleh lansia, Keempat bimbingan-bimbingan, tahap ini adalah pemberian bimbingan seperti bimbingan spiritual, penambahan pengetahuan, bimbingan kegiatan sehari-hari dan bimbingan keterampilan yang harus dilaksanakan oleh lansia. Hasil yang didapatkan lansia dalam pemberdayaannya adalah meningkatnya pendapatan lansia yang dihasilkan dari ketrampilan, kegiatan sehari-hari lansia lebih baik, tingginya aktivitas keagamaan yang dimiliki lansia, serta mental dan psikososial lansia meningkat dan aktivitas sosial yang lebih baik. Letak persamaan penelitian ini yaitu bahwa masyarakat Lansia berperan sebagai obyek penerima program. Selain itu masyarakat Lansia juga diberdayakan secara aktif dengan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk melatih kemampuan dan keterampilan pribadinya. Kemudian letak perbedaannya yaitu program yang diberikan dalam rangka pemberdayaannya berbeda. Selain itu institusi yang memberikan program pemberdayaannya juga berbeda.

2. Febrianti, dengan skripsi yang berjudul "*Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Bina Keluarga (BKL) Mugi Waras Kabupaten Sleman*". Penelitian ini menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat Lansia melalui suatu lembaga sosial masyarakat. Tujuan utama diadakannya pemberdayaan ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat Lansia. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh dari lembaga sosial Bina Keluarga dalam memberdayakan masyarakat Lansia di Kabupaten Sleman. Letak persamaan dengan penelitian diatas yaitu objek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga sosial Bina Keluarga yaitu masyarakat Lansia. Letak perbedaan dengan penelitian diatas yaitu cara dan metode dari pemberdayaan yang dimana pada penelitian diatas menggunakan metode usaha ekonomi

